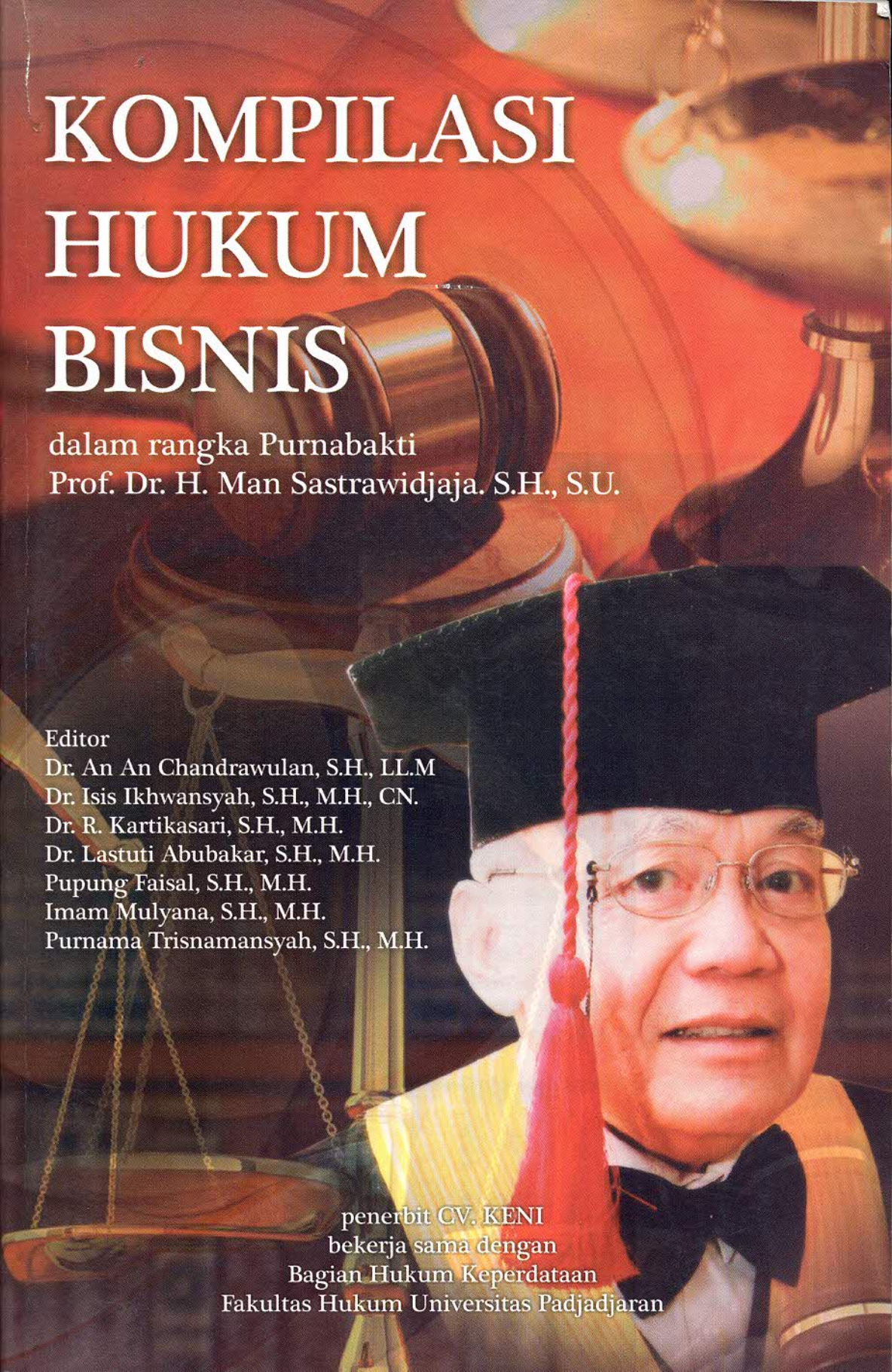


KOMPILASI HUKUM BISNIS



dalam rangka Purnabakti
Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja. S.H., S.U.

Editor

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.

Dr. R. Kartikasari, S.H., M.H.

Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.

Pupung Faisal, S.H., M.H.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

penerbit CV. KENI
bekerja sama dengan
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

KM.14.2012

KOMPILASI HUKUM BISNIS

Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaya, S.H.,S.U.

Editor:

Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H.,C.N.

ISBN: 978 602 98478 88

Cover Muka oleh:

Penerbit CV Keni Media

Anggota IKAPI

Jl. Salendro Timur II No 8

Bandung 40275. Tel. 022-7315535, Fax.:022-87340715

kenimedia@yahoo.com



Hak cipta ©. Dr. Isis Ikhwansyahh, S.H., M.H. C.N., dkk.
Beserta para pengarang.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku dengan cara memperbanyak dengan
cara apa pun juga, termasuk fotokopi,
dan lain-lain cara tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan pertama 2012
(Keni Media)
Isi di luar tanggung jawab Keni Media

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
KATA PENGANTAR DEKAN	v
DAFTAR ISI	vii
DIVESTASI, RENEGOSIASI DAN NASIONALISASI (Achmad Zen Umar Purba)	1
PENGELOLAAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN PERMASALAHANNYA (Djuhaendah Hasan)	25
PERDAGANGAN INTERNASIONAL PERIKANAN: PENGATURAN DAN TANTANGANNYA (Etty R Agoes)	33
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS (Eman Suparman)	45
DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DAN STRATEGI MENGHADAPINYA (E. Saefullah Wiradipradja)	55
REFORM OF ECONOMIC LAWS AND ITS EFFECTS ON THE POST-CRISIS INDONESIAN ECONOMY (Hikmahanto Juwana)	65
KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BAKU (Huala Adolf)	85
KEDUDUKAN KEKAYAAN PT (PERSERO) DALAM REZIM UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA SEBUAH PEMIKIRAN DARI SISI HUKUM BISNIS (Nindyo Pramono)	95
PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA (An An Chandrawulan)	111
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Agus Mulya Karsona)	155

PEMBELIAN KEMBALI (BUY-BACK) SAHAM SEBAGAI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN HUKUM PERSEROAN (Nyulistiowati Suryanti)	321
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP UTANG ANAK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK KETIGA (Kartikasari)	329
RAHASIA DAGANG PRODUK MAKANAN TRADISIONAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEBAGAI SALAH SATU POTENSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MAYSARAKAT INDONESIA (Siti Rodiah)	345
KEPAILITAN DEBITOR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB ATAS HARTA BENDA DEBITOR PERORANGAN YANG TERIKAT PERKAWINAN (Isis Ikhwansyah dan Soni Dewi Djudiasih)	361
PENERAPAN ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN PENGUNAAN MEREK DIHUBUNGAN DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHAN DENGAN MEREK TERKENAL (Sudjana)	375
ASPEK KEPAILITAN DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT (Zainal Muttaqin) ✓	395
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN TELEPON DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Aam Suryamah)	415
SITA JAMINAN TERHADAP ASET-ASET DEBITOR PAILIT DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG: KEDUDUKAN DAN PELAKSANAANNYA (Anita Afriana)	423
PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA (Asep Suryadi)	435

ASPEK KEPAILITAN DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT

Zalnal Muttaqin

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun oleh perusahaan, dana merupakan unsur penting. Sutan Remy Sjahdeni bahkan mengibaratkan dana sebagai "darah" bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya¹. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, demikian pula bagi perusahaan juga akan mati tanpa dana.

Bagi suatu perusahaan, baik perorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) dana dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui pinjaman (kredit) pada bank ataupun dari lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang memperjualbelikan surat-surat utang jangka pendek seperti *commercial paper*, pasar modal (*capital market*) dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Pemberian utang (*loan*) oleh kreditor kepada debitor lazimnya disertai dengan pemberian jaminan dari pihak debitor kepada kreditor. Pemberian jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak kreditor dalam hal apabila di kemudian hari debitor melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam dunia perbankan dikenal penjaminan berupa "*personal guarantee*" (penjamin perorangan) dan "*corporate guarantee*" (penjamin perusahaan) sebagai jaminan pelengkap, disamping jaminan kebendaan yang menjadi jaminan utama atas perjanjian utang piutang (kredit) sebagai perjanjian pokok.

Dalam hukum perdata dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidstelling*). Pada prinsipnya, maksud kedua macam lembaga jaminan ini adalah sama yaitu memberikan perlindungan kepada pihak kreditor berupa pemenuhan prestasi dari pihak debitor, dengan kata lain untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban pihak debitor.

Hukum memberikan berbagai cara untuk menyelesaikan utang piutang, dalam hal debitor ingkar janji, seperti melalui gugatan pengadilan, "perdamaian" di dalam maupun di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa = ADR) atau cara-cara lain seperti

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hlm.275.